

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Akuntansi Sektor publik dikatakan sebagai unsur dalam aparatur Negara, sebagai bentuk pelayanan masyarakat dalam suatu kegiatan sesuai dengan bidang fungsi masing-masing, salah satu dari sumber penting dalam pelaksanaan tugas kewajiban yang diberikan oleh pemerintah khususnya dalam instansi pendidikan untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum. Bidang kesehatan, pendidikan, keamanan dan transportasi adalah contoh sektor public (Mahsun 2006: 7). Bidang pendidikan merupakan salah satu pelayanan publik kepada masyarakat.

Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap warga negarayang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar minimal tanpa memungut biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat 2. Untuk mendukung pendidikan tersebut, pemerintah mengembangkan program berupa Operasional Sekolah. Program Bantuan (BOS), yang merupakan salah satu dari empat program utama pemerintah pada tahun 2005. Program BOS merupakan program bantuan pendidikan yang menyediakan dana untuk biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar, sebagai pelaksana program wajib belajar yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dana BOS juga berasal dari siswa (orang tua/wali), masyarakat (pengusaha), hibah yang diberikan kepada sekolah, dan swadana.

Program bantuan operasional sekolah pada awalnya dikembangkan oleh pemerintah hanya untuk mendukung program wajib belajar sembilan tahun (9 tahun) yang meliputi jenjang pendidikan dasar/ sederajat dan sekolah menengah pertama/ sederajat, setelah itu pemerintah memperluas program wajib belajar sembilan tahun. program pendidikan menjadi Program Pendidikan Menengah Universal (PMU). yang memberikan pembiayaan sampai dengan jenjang pendidikan SMA atau sederajat. Perluasan program PMU bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa sekolah menengah pertama/ sederajat Indonesia untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. BOS merupakan program pemerintah pusat untuk menyediakan dana bagi biaya operasional kepegawaian dan non personalia bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus non khusus. Program Bantuan Operasional Sekolah telah dilaksanakan sejak Juli 2005. Menurut Dirjen Pendidikan Dasar pada Petunjuk Teknis BOS 2015, program dana BOS memiliki tujuan umum, yaitu meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam kerangka dari 9 tahun. Sedangkan tujuan khusus BO adalah: 1) membebaskan seluruh siswa dari biaya operasional sekolah, 2) membebaskan seluruh siswa miskin dari pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, dan 3) mengurangi biaya operasional sekolah, khususnya bagi siswa di sekolah swasta.

Dengan adanya program dana BOS, sekolah dituntut untuk dapat merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mempertanggung jawabkan pengelolaan

biaya pendidikan secara transparan kepada pemerintah dan juga masyarakat. Pengelolaan dana BOS merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program dana BOS, karena dengan pengelolaan dana BOS yang baik akan membantu tercapainya tujuan program dana BOS secara efektif dan efisien, serta akan mensukseskan sekolah yang mengelola dana BOS tersebut.

Dalam pengelolaan dana BOS, sekolah harus mengacu dan berpedoman pada petunjuk teknis BOS, yang di dalamnya telah dijelaskan bahwa dalam merencanakan penggunaan dana BOS, hal utama yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). RKAS merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan dan susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin dan kegiatan lainnya disertai dengan rincian rencana pembiayaan selama satu tahun anggaran.

Dengan demikian program BOS sangat mendukung pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian keleluasaan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya sekolah, serta mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dan pendidikan didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesempatan dan keputusan bersama antara tim pengelola BOS sekolah, dewan guru, dan komite sekolah, yang harus didaftarkan sebagai salah satu sumber penerimaan dalam

RKAS/RAPBS, selain itu untuk dana yang diperoleh dari sumber lain yang sah. Organisasi yang bertanggung jawab atas BOS dari sekolah adalah: kepala sekolah dan komite sekolah.

Tugas tanggungjawab yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai organisasi sektor publik terbesar adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan sebuah konsep yang sangat multikompleks. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya berupa kesejahteraan fisik yang bersifat material saja, namun termasuk kesejahteraan nonfisik yang bersifat material. Penilaian dari masyarakat terhadap organisasi sektor publik kurang efektif dan efisien. Pemerintah terkadang sering mengeluarkan biaya-biaya untuk kegiatan yang kurang penting sehingga dianggap sebagai suatu pemborosan. Organisasi sektor publik menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial dan manfaatnya bagi publik, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan (Renyowijoyo 2008: 2).

SD GMIT Lanu mendapat dana BOS dari pemerintah. Program-program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik sehingga guru dan siswa-siswi yang berada di SD GMIT Lanu dapat merasakan manfaatnya. Instansi SD GMIT Lanu dapat mencapai tujuannya untuk melayani guru dan siswa-siswi yang berada di SD GMIT Lanu dengan baik.

Penelitian terdahulu oleh Karmila (2021) tentang pengelolaan dana BOS di SD Negeri Sampil II Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan” mengatakan bahwa Program Bantuan Operasional Sekolah dikepalai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan, penyaluran dan pengelolaannya dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama sebagai kementerian teknis yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program BOS. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara dengan kepala sekolah, bendahara, komite sekolah. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang berdasarkan pada data realisasi dana bantuan operasional sekolah. Hasil analisis yaitu: 1) pengelolaan dana BOS diawali dengan penyusunan RKAS yang dilaksanakan dengan rapat antara kepala sekolah, bendahara, guru dan komite, 2) pelaksanaan dana BOS sudah memenuhi standar dan sesuai dengan petunjuk teknis BOS 2020, 3) pelaporan dana BOS dibuat setiap tahap dan akhir periode dana BOS untuk dilaporkan ke Tim BOS Kabupaten dan Kementrian yang dikirim lewat email, 4) faktor yang menghambat pengelolaan yaitu keterlambatan penyaluran dana BOS dari pihak pusat ke sekolah, 5) upaya yang dilakukan sekolah dalam menangani hambatan yang terjadi ialah dengan memaksimalkan dana kepada kebutuhan yang paling penting seperti pengadaan buku pelajaran siswa, pembelian alat tulis kantor, dan gaji guru. Temuan studi kasus ini dapat dianggap penting bagi stakeholder sekolah dan masyarakat sebagai pengawasan pengelolaan keuangan sekolah yang memungkinkan penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan sekolah. Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian, ini Berjudul Analisis Efektifitas pengelolaan Dana BOS pada Sekolah Dasar (SD) GMIT Lanu Desa Lanu Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi masalah penelitian ini **Analisis Efektifitas pengelolaan Dana BOS pada Sekolah Dasar (SD) GMIT Lanu Desa Lanu Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan.**

## **1.3. Persoalan Penelitian**

Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka persoalan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses perencanaan dan penyusunan pengelolaan Dana BOS pada SD GMIT Lanu Kecamatan Amanatun Selatan
2. Bagaimana Pelaksanaan dan Pelaporan Dana BOS pada SD GMIT Lanu Kecamatan Amanatun Selatan

#### **1.4. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan persoalan penelitian di atas, maka tujuan penelitian dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1.4.1 Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui proses perencanaan dan penyusunan pengelolaan Dana BOS pada SD GMIT Lanu Kecamatan Amanatun Selatan
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan dan Pelaporan Dana BOS pada SD GMIT Lanu Kecamatan Amanatun Selatan

##### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

###### **1. Akademik**

Sebagai bahan informasi bagi pembaca atau peneliti lain yang ingin melakukan penelitian pada bidang yang sama dan dapat bermanfaat bagi mahasiswa/IFak. Ekonomi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

###### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi Instansi SD GMIT Lanu maupun pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dengan pengelolaan dana BOS dimasa datang